



Research Paper

Analisis Kritis Status Keberlanjutan PSN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai Dalam Mendorong Pembangunan Berbasis Ekonomi Biru (*Blue Economy*) di Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara

Cocon

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara-Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-Kementerian Kelautan dan Perikanan

Koresponden: infoakuakultur@gmail.com

CITATION

Cocon. (2024). Analisis Kritis Status Keberlanjutan PSN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai Dalam Mendorong Pembangunan Berbasis Ekonomi Biru (*Blue Economy*) di Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara. Indonesian Journal of Transformation Studies. Volume(1): 1.

ARTICLE INFO

Received: 27 August 2024

Accepted: 24 October 2024

Available online: 9 December 2024

Abstrak: Sektor perikanan di Kabupaten Morotai memiliki potensi besar namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun struktur ekonomi masyarakat. Posisi geo-strategis Morotai masih belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui PP Nomor 50 Tahun 2014, pemerintah menetapkan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fokus pada industrialisasi perikanan dan pengembangan ekonomi biru. Kajian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi KEK Morotai dalam mendorong ekonomi biru melalui penilaian indeks keberlanjutan dari enam aspek: perencanaan, anggaran, regulasi, tata kelola, kelembagaan, teknologi, infrastruktur, kelestarian sumber daya, ekonomi, dan sosial-budaya. Kajian juga memetakan faktor-faktor sensitif yang perlu diintervensi, aktor-aktor yang terlibat, serta strategi kebijakan yang diperlukan. Metode analisis menggunakan Multidimensional Scaling (Rap-fish), analisis Pareto, analisis stakeholder, dan evaluasi SMART. Hasil menunjukkan implementasi KEK Morotai masih kurang efektif, dengan indeks keberlanjutan sebesar 49,28, masuk kategori kurang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan meliputi evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor sensitif, khususnya pada aspek perencanaan, tata kelola, teknologi, kelestarian sumber daya, ekonomi, dan sosial-budaya, untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan KEK Morotai secara efektif.

Kata Kunci: Blue Economy, geo-strategis, Kawasan Ekonomi Khusus, Keberlanjutan, Perikanan

1. Pendahuluan

Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai, yang dikenal dengan nilai geostrategisnya, memiliki potensi besar baik dari segi geo-ekonomi maupun geo-politik. Secara geo-ekonomi, Morotai merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, jalur migrasi ikan tuna, serta berada pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) utama: WPP 715, WPP 716, dan WPP 717. Potensi lestari perikanan tangkap Morotai diperkirakan mencapai 68.566 ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 9,15% pada 2019 (BPS Morotai, 2022). Lokasi strategis ini juga memberikan keuntungan logistik untuk ekspor produk perikanan ke negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, sehingga dapat menekan biaya logistik.

Meski memiliki sumber daya yang melimpah, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah masih minim. Pada 2021, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan hanya menyumbang 0,8% terhadap PDRB Kabupaten Morotai. Ironisnya, PDRB Morotai tercatat sebagai yang terendah kedua dari sepuluh kabupaten di Provinsi Maluku Utara (BPS Morotai, 2022). Selain itu, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing menghambat optimalisasi nilai

ekonomi. Kondisi masyarakat nelayan juga mencerminkan ketimpangan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 62,10, angka kemiskinan 5,56%, dan tingkat pengangguran terbuka 6,27%.

Secara historis, pengembangan Morotai berbasis sumber daya maritim telah dirintis sejak 2009. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Morotai sebagai "Mega Minapolitan" dan Lumbung Ikan Nasional. Dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo, Morotai diresmikan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Namun, kebijakan ini belum menunjukkan efek "trickle-down" signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketergantungan pada pendekatan pembangunan berbasis daratan (*land-based development*) serta fokus pembangunan di Pulau Jawa menciptakan kesenjangan ekstrem bagi daerah-daerah maritim seperti Morotai. Penetapan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui PP Nomor 50 Tahun 2014 bertujuan memperbaiki arah kebijakan sebelumnya. KEK Morotai diharapkan mengoptimalkan keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah ini, terutama melalui pengembangan industri perikanan, logistik, dan pariwisata. KEK ini juga dirancang untuk merangsang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Meski demikian, keberhasilan KEK Morotai tergantung pada harmonisasi regulasi, dukungan politik, penguatan kelembagaan, serta perencanaan dan implementasi yang efektif.

Kajian ini menjadi penting untuk mengevaluasi status keberlanjutan KEK Morotai berdasarkan indikator multidimensi, termasuk aspek perencanaan, tata kelola, teknologi, ekonomi, dan sosial-budaya. Melalui pendekatan *evidence-based*, kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan agar KEK Morotai selaras dengan prinsip pembangunan ekonomi biru (*blue economy*), yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

2. Kajian Literatur

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seringkali dipandang sebagai salah satu pendekatan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan daya saing regional. Literatur menunjukkan bahwa KEK dirancang untuk mengatasi hambatan investasi melalui insentif fiskal, akses infrastruktur, dan peraturan yang mendukung. Konsep ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara seperti India, China, dan Kamboja dengan hasil yang bervariasi, tergantung pada perencanaan dan implementasinya (Wood, 2017; Brussevich, 2020). Keberhasilan KEK sering dikaitkan dengan faktor kelembagaan, dukungan kebijakan, dan pengelolaan infrastruktur. Menurut Suryani dan Febriani (2020), KEK yang efektif harus mampu menarik investasi dengan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri utama. Namun, kelembagaan yang lemah, kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan, serta tumpang tindih regulasi dapat menjadi penghambat signifikan. Studi pada KEK Sei Mangkei di Sumatera menunjukkan bahwa meskipun kawasan ini memiliki potensi besar, hambatan regulasi dan konektivitas infrastruktur menghalangi optimalisasi (RS & Silvia, 2017).

Konsep pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) menjadi elemen kunci dalam pengembangan KEK berbasis perikanan seperti Morotai. Prinsip ekonomi biru menekankan keberlanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Menurut Gunter Pauli (2010), *blue economy* mendorong inovasi yang memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien sambil mempertimbangkan dampak lingkungan. Namun, tantangan dalam penerapannya meliputi perlunya manajemen berbasis ekosistem, penyediaan data yang andal, dan pengawasan praktik perikanan yang bertanggung jawab (Abdullah et al., 2020). Di sektor perikanan, penerapan konsep *blue economy* di KEK Morotai menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan akses infrastruktur, belum optimalnya tata kelola kelembagaan, dan rendahnya kapasitas nelayan lokal. Menurut laporan BPS Morotai (2022), meskipun potensi lestari perikanan Morotai mencapai 68.566 ton per tahun, pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Selain itu, praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing terus menjadi ancaman yang mempengaruhi keberlanjutan sumber daya ikan.

Faktor sosial-budaya juga mempengaruhi keberlanjutan KEK. Studi oleh Iskandar dan Sulistyaningrum (2023) mencatat bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal, tingginya angka pengangguran, serta prevalensi

stunting menjadi tantangan utama dalam pembangunan berbasis maritim di Morotai. Kajian ini sejalan dengan temuan Suryani dan Febriani (2020) bahwa KEK harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar agar dapat diterima secara sosial. Berbagai literatur ini menegaskan arti pentingnya sinergi antara kebijakan, kelembagaan, dan infrastruktur dalam mendukung keberlanjutan KEK. Tanpa perencanaan terpadu dan dukungan politik yang kuat, KEK berisiko gagal mencapai tujuan awalnya, yaitu menciptakan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

3. Metode

KEK Morotai diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), percepatan investasi, penyerapan tenaga kerja, menjadi penghela bagi daerah sekitarnya, dan memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dalam kerangka konsep pembangunan ekonomi biru (*blue economy*). Mencermati hasil evaluasi terhadap kinerja implementasi kebijakan dan program sebelum adanya KEK Morotai, maka setidaknya 6 (enam) isu strategis yang menjadi penyebab utama kebijakan dan program yang ada di Kabupaten Morotai tidak berjalan secara efektif, dan bahkan tidak berkesinambungan. Ke-enam isu strategis tersebut antara lain: aspek perencanaan yang tidak komprehensif; dukungan penganggaran/investasi yang terbatas; tata kelola dan kelembagaan yang tidak kuat, regulasi yang kurang mendukung iklim usaha, minimnya dukungan politik, minimnya keterlibatan dan dukungan dari *stakeholders*, dan minimnya partisipasi public.

Disamping itu, berdasarkan laporan akhir Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021, mengklasifikasikan bahwa KEK Morotai merupakan KEK yang perlu mendapat perhatian khusus. Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah/isu strategis di atas, maka pertanyaan dalam kajian ini yaitu (1) bagaimana status keberlanjutan dan efektifitas KEK Morotai dalam mendorong ekonomi biru ditinjau dari indikator aspek perencanaan, anggaran dan regulasi; aspek tata kelola dan kelembagaan; aspek teknologi dan infrastruktur; aspek kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; aspek ekonomi dan aspek sosial-budaya; dan (2) bagaimana melakukan intervensi strategi untuk keberlanjutan KEK Morotai agar berdampak terhadap pencapaian pembangunan ekonomi biru.

Metode analisis yang digunakan untuk menilai status keberlanjutan adalah dengan pendekatan *Multidimensional Scaling* (MDS) dengan teknik ordinasi *Rap-fish*. Teknik ordinasi *Rap-fish* yaitu menentukan sesuatu pada urutan yang terukur dengan metode *Multidimensional Scaling* (MDS) (Fauzi dan Anna, 2005). Adapun ruang lingkup yang akan menjadi objek analisis yakni aspek-aspek yang terkait langsung dengan konsepsi *blue economy* di sektor perikanan dengan mengacu pada hasil modifikasi yang bersumber dari Bappenas, WWF dan pakar *blue economy* (Gunter Paulli). Aspek multidimensi tersebut terdiri dari 6 (enam) dimensi/aspek yakni: (1) aspek perencanaan, anggaran dan regulasi; (2) aspek tata kelola dan kelembagaan; (3) aspek teknologi dan infrastruktur; (4) aspek ekonomi; (5) aspek sosial-budaya; dan (6) aspek sumber daya ikan dan lingkungan. Untuk menentukan faktor-faktor sensitif yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan KEK Morotai digunakan pendekatan *pareto analysis*. Untuk memetakan peran actor (*stakeholders*) yang terlibat digunakan pendekatan analisis aktor (*stakeholders analysis*), sedangkan untuk melakukan evaluasi dan penentuan skenario strategi menggunakan pendekatan *SMART Evaluation Method*.

Nilai indeks dan status keberlanjutan dikelompokkan ke dalam 4 kategori, seperti ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 1 di bawah:

Tabel 1. Nilai indeks dan kategori keberlanjutan

Nilai Indeks	Kategori Berkelanjutan
00,00 – 25,00	Buruk; Tidak Berkelanjutan
25,01 – 50,00	Kurang; Kurang Berkelanjutan
50,01 – 75,00	Cukup; Cukup Berkelanjutan
75,01 – 100,00	Baik; Sangat Berkelanjutan

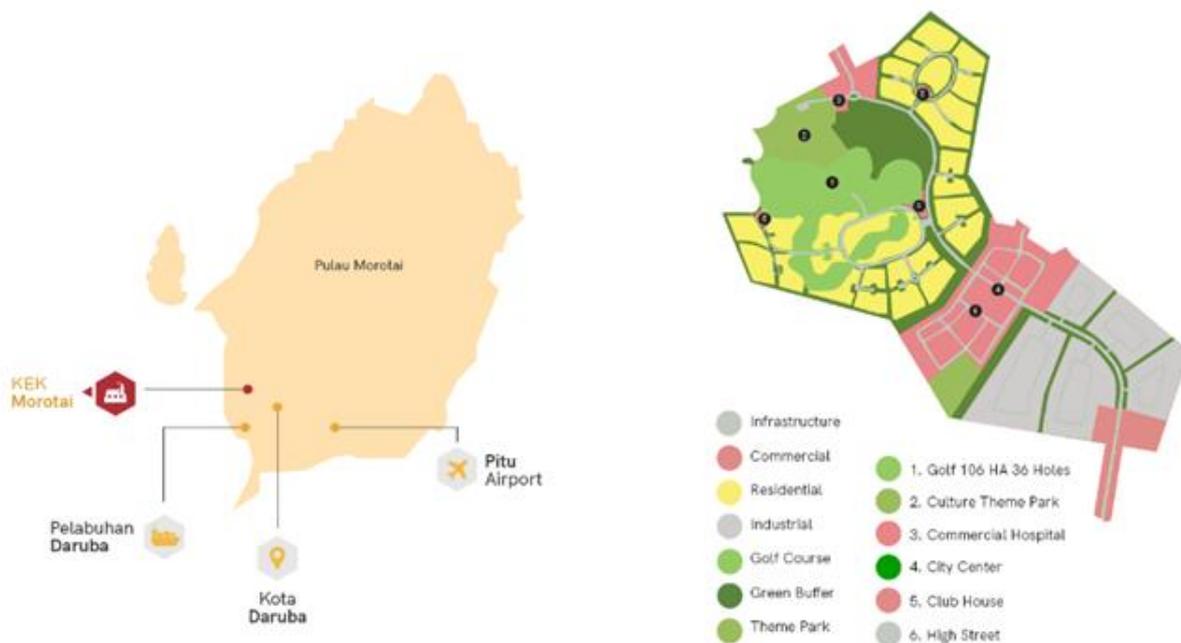
Sumber : Fauzi A dan S. Anna (2002)

4. Hasil

4.1. Profil KEK Morotai

KEK Morotai yang terletak di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014, memiliki luas area 1.101,76 Ha. KEK Morotai memiliki keunggulan geostrategis yaitu merupakan pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur. Berada di tengah Samudera Pasifik, Pulau Morotai dahulu merupakan salah satu basis militer pada Perang Dunia II yang kini kaya akan barang peninggalan bersejarah. Selain menjadi wisata sejarah, KEK Morotai juga memiliki keunggulan wisata bahari dengan keindahan pantai dan bawah laut yang mempesona. Hamparan pasir putih halus, air laut yang jernih serta terumbu karang yang indah merupakan daya tarik wisata KEK Morotai (Dewan Nasional KEK, 2022). Dilintasi oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang juga merupakan jalur migrasi ikan tuna, KEK Morotai merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan perikanan. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Morotai akan menjadi pusat industri perikanan didukung dengan logistik yang akan menjadikan Pulau Morotai hub internasional di kawasan timur Indonesia.

Morotai disiapkan sebagai KEK dengan kegiatan utama pengolahan perikanan, pariwisata, dan logistik, pembangunan di KEK Morotai terus berjalan. Pada Gambar 1, PT Jababeka Morotai selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) dan pelaku usaha, telah selesai membangun Loft Studio I Tower dengan 81 unit dan siap beroperasi. Selain itu juga sudah tersedia 41 unit homestay dan proses pemecahan sertifikat homestay telah selesai dan sudah terjual 17 unit. Dan juga telah tersedia 6 unit ruko UMKM dan kantor administrator di kawasan. Selain itu, PT Jababeka Morotai telah memanfaatkan sistem pelayanan elektronik kepabeanan dan perpajakan. Sepanjang tahun 2022, KEK Morotai telah merealisasikan investasi sebesar Rp. 187,95 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 40 orang. Sementara, capaian kumulatif investasi sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 449,95 miliar dan total penyerapan kerja mencapai 140 orang (PT. Jababeka Morotai, 2022).



Gambar 1. Kawasan KEK Morotai

4.2. Indeks dan Status KEK Morotai

Hasil telaahan dan analisis terhadap indikator pada masing-masing aspek yang dinilai paling krusial dipenuhi dalam upaya pengembangan KEK Morotai yang berbasis pada pembangunan ekonomi biru (*blue economy*). Analisis menggunakan pendekatan *multidimensional scaling* (MDS) dengan menggunakan perangkat teknik ordonasi *Rap-Fish*, dapat disimpulkan bahwa KEK Morotai memiliki indeks keberlanjutan 49,28 (Lihat Tabel 2) Nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa KEK Morotai memiliki kategori status kurang berkelanjutan (Fauzi & Anna, 2002).

Status ini sejalan dengan hasil evaluasi dari Dewan Nasional KEK Morotai Tahun 2021 yang memasukan KEK Morotai sebagai KEK yang perlu mendapat perhatian khusus. Lebih detail indeks dan status keberlanjutan pada masing-masing aspek yang menjadi indikator penilaian, tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Indeks dan Status Keberlanjutan KEK Morotai

No	Indikator Aspek	Indeks (RMS)	Kesimpulan Analisis
1	Perencanaan, Anggaran dan Regulasi	48,81	Kurang Berkelanjutan
2	Tata kelola dan Kelembagaan	44,89	Kurang Berkelanjutan
3	Teknologi dan Infrastruktur	49,22	Kurang Berkelanjutan
4	SDI dan Lingkungan	50,38	Cukup Berkelanjutan
5	Ekonomi	49,71	Kurang Berkelanjutan
6	Sosial-Budaya	52,67	Cukup Berkelanjutan

4.3. Faktor Pengungkit dan Faktor Sensitif pada Masing-Masing Dimensi

Hasil analisis MDS menggunakan teknik oordinasi Rapfish dan analisis pareto pada pada masing-masing dimensi menunjukkan bahwa terdapat terdapat faktor – faktor yang paling sensitif berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan KEK Morotai. Lebih lanjut, hasil analisis Pareto menunjukkan terdapat beberapa faktor sensitif yang perlu diintervensi dalam upaya meningkatkan kinerja KEK Morotai. Adapun faktor-faktor *sensitive* pada masing-masing dimensi seperti terlihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Faktor Sensitif Masing-masing Dimensi yang Perlu Diintervensi untuk Meningkatkan Kinerja KEK Morotai

No	Dimension	Sensitive Factors
A	Perencanaan, Anggaran, dan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep keterpaduan antar wilayah; 2. Kesesuaian perencanaan dengan anggaran; 3. Insentif fiskal dan moneter; 4. Efektifitas skema pembiayaan.
B	Tata Kelola dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas pola kemitraan; 2. Sinergitas antar stakeholders; 3. Efektifitas skema kelembagaan pengelola; 4. Kesesuaian program dengan realisasi; 5. Kesesuaian KEK dengan tata ruang/zonasi.
C	Teknologi dan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja efisiensi logistic perikanan; infrastruktur dasar; 2. Pelabuhan perikanan serta fasilitas pendukungnya; 3. Efektivitas kawasan industri perikanan terpadu; 4. Akses nelayan terhadap sarpras perikanan tangkap; 5. Rasio jumlah kapal dengan kebutuhan industri; 6. Kinerja tol laut dalam mendukung akses pasar perikanan.
D	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM);

		2.	Status stok sumber daya ikan;
		3.	Trend IUU and destructive fishing;
		4.	Status ekosistem penyangga.
E	Ekonomi	1.	Kinerja struktur ekonomi nelayan; kinerja investasi;
		2.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Morotai;
		3.	Kinerja produksi perikanan tangkap;
		4.	Kinerja ekspor produk perikanan.
F	Sosial Budaya	1.	Potensi konflik sosial atas penetapan KEK Morotai;
		2.	Tingkat kemiskinan; jumlah tenaga kerja formal dalam KEK terhadap total tenaga kerja;
		3.	Indeks pembangunan manusia;
		4.	Penghargaan terhadap local wisdom;
		5.	Prevalensi stunting; jumlah nelayan lokal;
		6.	Pengangguran terbuka.

Sumber: Hasil Analisis Pareto

4.4. Stakeholders Mapping

Aktor-aktor potensial yang terlibat dalam pelaksanaan KEK Morotai harus mampu teridentifikasi, termasuk peran dan fungsinya dalam membangun subsistem yang ada. Tingkat kepentingan aktor-aktor tersebut dipetakan melalui pendekatan analisis stakeholders. Dalam upaya melakukan intervensi kebijakan untuk memperbaiki kinerja KEK Morotai, maka peran *stakeholders* menjadi hal yang paling penting untuk menjamin keberhasilan program. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memberdayakan peran stakeholders sesuai dengan klasifikasinya.

Berdasarkan kuadran hasil analisis *stakeholders*, maka dapat dipetakan strategi dalam optimalisasi peran stakeholder tersebut dalam perbaikan kinerja KEK Morotai, sebagai berikut:

- 1) *Stakeholders* yang memiliki tingkat pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) dan besar dalam upaya penyelesaian isu strategis KEK Morotai adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Nasional KEK Morotai (Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR/BPN), PT. Jababeka KEK Morotai dan/atau investor lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai, dan Pemprov Maluku Utara. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan terhadap stakeholders ini yakni harus lebih aktif dilibatkan secara penuh mulai dari perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program, replikasi model dan termasuk mengevaluasi strategi baru dalam implementasi KEK Morotai.
- 2) *Stakeholders* dengan memiliki pengaruh (*influence*) yang tinggi tetapi tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Bakamla RI, Kementerian LHK, Bakamla, Polairud dan lembaga pembiayaan/bank. *Stakeholders* ini dapat berubah menjadi *key players* karena dalam kondisi tertentu. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.
- 3) *Stakeholders* dengan memiliki pengaruh (*influence*) yang rendah tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi adalah masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, dan pengolah), dan private sector. *Stakeholders* ini sangat membantu dalam pengembangan KEK Morotai, sehingga hubungan dengan stakeholders ini harus tetap dijaga dengan baik melalui pelibatan secara aktif.
- 4) *Stakeholders* dengan tingkat pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) yang rendah adalah Lembaga riset/perguruan tinggi, dan Media Massa. *Stakeholders* ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.

5. Diskusi

Hasil analisis melalui pendekatan *multidimensional scaling* (MDS), *pareto analysis*, dan *stakeholders analysis*, maka dapat dijabarkan beberapa temuan hasil evaluasi terhadap keberlanjutan KEK Morotai. Temuan tersebut, harus menjadi fokus perhatian pemangku kebijakan dalam melakukan perbaikan kinerja KEK Morotai agar selaras dengan

tujuan awal. Pada saat kajian ini dilakukan, hasil analisis keberlanjutan menyimpulkan bahwa KEK Morotai masuk dalam kategori kurang berkelanjutan dengan capaian nilai indeks keberlanjutan 49,28. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan KEK Morotai belum memberikan dampak signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) di Kabupaten Morotai. Hal ini ditunjukkan masih banyak indikator yang perlu perbaikan dan intervensi. Dengan kata lain, KEK Morotai perlu perbaikan terutama terhadap factor-faktor (atribut) pada masing-masing aspek mulai dari perencanaan, tata kelola dan kelembagaan, teknologi dan infrastruktur, pengelolaan SDI dan lingkungan, dan aspek ekonomi, dan sosial-budaya.

Status KEK Morotai yang kurang berkelanjutan, sejalan dengan hasil evaluasi Dewan Nasional KEK tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa KEK Morotai menjadi salah satu KEK yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini disebabkan kinerja-nya yang masih di bawah target. Disamping itu, PT. Jababeka KEK Morotai sebagaimana dikutip harian Kompas edisi 27 September 2021 menyampaikan bahwa pengembangan KEK Morotai dan Tanjung Lesung masih di bawah target. KEK Morotai, yang berjarak 2.500 kilometer dari Jakarta, masih sulit berkembang selama 10 (sepuluh) tahun terakhir karena hambatan regulasi dan iklim usaha. KEK Morotai yang diarahkan untuk industri perikanan dan pariwisata itu belum berjalan optimal. Sampai tahun 2021 ini belum ada investor yang masuk dan menggarap industri perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan di kawasan tersebut. Kurang optimalnya kinerja KEK Morotai, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi biru, disebabkan oleh berbagai faktor sensitive yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan KEK Morotai. Faktor-faktor sensitive tersebut yang harus menjadi prioritas yang harus diintervensi.

5.1. Faktor-faktor sensitive pada aspek perencanaan, anggaran dan regulasi

Konsep keterpaduan antar wilayah

Hasil analisis terhadap sejauh mana perencanaan KEK Morotai telah mempertimbangkan prinsip keterpaduan wilayah, menunjukkan bahwa dalam implementasinya KEK Morotai yang digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan (*growth center*) belum memberikan *spread effect* terhadap perkembangan ekonomi di wilayah lain. Ini bisa dilihat dari adanya disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup lebar. Ironisnya, Kabupaten Morotai justru menempati urutan 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) Kabupaten yang memiliki PDRB terendah di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa KEK Morotai belum memiliki kinerja sebagai pendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, ada nilai ekonomi sumber daya yang justru keluar wilayah Morotai. Kondisi ini menyimpulkan lemahnya aspek perencanaan KEK Morotai.

Kesesuaian perencanaan dan anggaran

Sejauh ini hasil analisis dan telaahan terhadap laporan akhir perkembangan KEK Morotai sampai dengan periode semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan KEK Morotai khususnya untuk zona industri pengolahan perikanan beserta unsur pendukungnya masih belum didukung oleh realisasi anggaran yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sektor perikanan tidak tergarap dengan optimal. Dalam laporannya PT. Jababeka KEK Morotai sebagaimana dikutip oleh bisnis.com edisi 17 November 2021 menyebut bahwa belum ada investor yang masuk dan menggarap industri perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan di kawasan tersebut. Sepanjang tahun 2022, KEK Morotai telah merealisasikan investasi sebesar Rp. 187,95 miliar dari target investasi sampai tahun 2025 senilai Rp. 30,44 triliun. Disisi lain, kendala lainnya yakni kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi.

Insentif fiskal dan moneter

Pemerintah telah memberikan kemudahan untuk mendorong masuknya investasi melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal antara lain: (1) tax holiday 100% dan tax allowance; (2) pembebasan PPN; (3) tarif bea masuk 0% untuk TKDN minimal 40%; (4) pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah 50-100%; (5) kemudahan perizinan; dan (6) insentif dan fasilitas lainnya. Hasil analisis terhadap berbagai insentif dan fasilitas lainnya tersebut pada faktanya

belum memberikan daya ungkit terhadap investasi yang masuk di KEK Morotai, khususnya di sektor perikanan. Realisasi investasi baru sekitar 0,62 % dari proyeksi awal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Akademisi Universitas Indonesia, Achmad Fauzi (2021) yang menyebut bahwa pemberian fasilitas insentif bagi pelaku usaha saat ini masih bersifat umum. Padahal, kebutuhan investor di tiap sektor itu berbeda-beda. Tidak semua investor membutuhkan insentif fiskal untuk menjalankan usahanya.

Efektifitas skema pembiayaan

Selain pembiayaan melalui APBN, porsi pembiayaan KEK Morotai yang lebih besar ditargetkan melalui investor (badan usaha pengelola). KEK Morotai dikelola oleh PT. Jababeka KEK Morotai. Namun demikian hasil telaahan dari Laporan PT. Jababeka KEK Morotai, nampaknya badan pengelola ini menghadapi kendala dalam hal pembiayaan. Disisi lain, PT, Jababeka KEK Morotai justru hanya fokus pada pengembangan pariwisata, dan belum ada pembiayaan masuk pada pembangunan sentral/kawasan pusat industri perikanan. Pengembangan industri pengolahan ikan di KEK Morotai memerlukan dukungan kebijakan yang mampu menarik industri skala besar untuk menggarap sektor perikanan tangkap, pengolahan ikan, hingga kesiapan bandar udara internasional serta proses bea dan cukai untuk ekspor perikanan. Terkait dengan ini, hasil analisis menyimpulkan bahwa Badan Usaha dan konsorsium masih lemah dalam menggandeng investasi masuk.

5.2. Faktor-faktor sensitif pada aspek tata kelola dan kelembagaan

Efektivitas pola kemitraan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada KEK Morotai, khususnya di sektor perikanan belum didorong secara optimal. Skema pengelolaan masih difokuskan pada sektor pariwisata. Hingga tahun 2022 belum ada pola kemitraan yang dibangun terutama dengan *private sector* untuk mengefektifkan dan mengembangkan industri perikanan. Keberadaan Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) juga belum efektif berjalan, salah satunya karena belum terbangunnya kemitraan pasar dan lainnya. Kesimpulan analisis bahwa pengembangan industri sector perikanan di KEK Morotai memerlukan dukungan kebijakan yang mampu menarik industri skala besar untuk menggarap sektor perikanan tangkap, pengolahan ikan, hingga kesiapan bandar udara internasional, pelabuhan ekspor serta proses bea dan cukai untuk ekspor perikanan. Hal tersebut juga diakui oleh PT. Jababeka KEK Morotai bahwa semua fasilitas tersebut belum tersedia.

Sinergitas antar stakeholders

Peran *stakeholders* sangat penting dalam menjamin efektifitas KEK Morotai. Hasil wawancara dengan responden kunci menyebut bahwa salah satu kelemahan KEK secara umum, khususnya KEK Morotai karena kurangnya sinergitas antar stakeholders. Achmad Fauzi (2021) menyebut bahwa tidak cukup kalau pemerintah pusat sampai daerah hanya membuat regulasi dan menetapkan KEK, tetapi tidak ada pendampingan khusus dan kerjasama yang baik, terutama untuk KEK yang masih sangat baru dan ada di luar Jawa. Senada dengan itu, Eko Sakapurnama (2021) mempertegas bahwa pengembangan KEK memerlukan kolaborasi antara pemerintah, kalangan pengusaha, dan perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi sangat penting dalam memberikan gagasan dan inovasi untuk mengembangkan KEK Morotai.

Efektifitas skema kelembagaan pengelola

Hasil telaahan dokumen dan wawancara dengan responden kunci menyimpulkan bahwa kelembagaan pengelola KEK Morotai belum secara efektif mampu mendorong percepatan realisasi KEK Morotai, terutama pada pembangunan zona industri perikanan. Badan Usaha yang ditunjuk dalam hal ini PT. Jababeka Morotai masih belum mampu membawa investasi masuk, terutama di sektor perikanan.

Kesesuaian program dengan realisasi

Hasil telaahan dokumen terhadap progress pelaksanaan KEK Morotai menyimpulkan bahwa KEK Morotai belum berjalan optimal baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik terlihat dari belum terbangunnya zona/kawasan industri

perikanan yang berorientasi ekspor, infrastruktur yang belum sepenuhnya dibangun secara optimal terutama bandar udara dan pelabuhan ekspor, realisasi investasi yang masih minim yakni baru sebesar Rp. 449 milyar dari target investasi di tahun 2025 senilai Rp. 30,44 triliun dan lainnya. Disamping itu realisasi penyerapan tenaga kerja baru mencapai 100 orang (0,33%) dari target 30.000 orang di tahun 2025. Jadi, diantara beberapa KEK yang dibentuk tahun 2014, Morotai berada di level kedua terendah untuk capaian realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja (Dewan Nasional KEK, 2021). Hal ini mengindikasikan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan KEK Morotai.

Bukti lain yang relevan dengan hasil penelitian didapat berdasarkan laporan KEK tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Jababeka Morotai yang merupakan Badan Usaha pengembang KEK Morotai, saat ini operasional KEK Morotai masih terus berjalan, tetapi ada beberapa kendala yang mungkin memperlambat capaian atas target yang direncanakan dan diprediksi juga berdampak terhadap progress pertumbuhan ekonomi di Morotai diantaranya : (1) akses konektivitas yang sulit; (2) industri perikanan sampai dengan saat ini belum bisa berjalan karena masih berlakunya Moratorium Kementerian Kelautan Perikanan tentang operasional Kapal Asing; (2) Peraturan Daerah untuk pemberian insentif kemudahan sampai saat ini belum ada. Padahal, dalam perencanaan KEK Morotai disebutkan bahwa KEK Morotai akan menjadi pusat industri perikanan didukung dengan logistik yang akan menjadikan Pulau Morotai *hub* internasional di kawasan timur Indonesia.

Kesesuaian KEK dengan tata ruang/zonasi.

Dalam prinsip pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) konsep keterpaduan wilayah, khususnya di kawasan pesisir harus menjadi pertimbangan utama. KEK Morotai merupakan proyek strategis nasional (PSN) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014. Karena merupakan bagian dari PSN maka secara legal formal KEK Morotai telah sesuai dengan tata ruang dan zonasi.

Pembangunan ekonomi biru harus mempertimbangkan antara pemanfaatan nilai ekonomi sumber daya (ekonomi) dengan kelestarian lingkungan perairan. Melihat hal ini, KEK Morotai semestinya diarahkan melalui pendekatan *integrated coastal zone management* (ICZM) agar kegiatan di in-land (daratan) tidak berdampak terhadap kesehatan laut. Kasus pencemaran limbah tambang di Halmahera turut memberikan efek negatif terhadap produktivitas perikanan dan kesehatan laut. Kondisi ini turut memberikan tekanan terhadap status keberlanjutan KEK Morotai.

5.2.1. Faktor-faktor sensitif pada aspek teknologi dan infrastruktur

Kinerja efisiensi logistik perikanan

Kinerja logistic paska KEK Morotai masih belum optimal, hal ini mengacu pada data yang dirilis oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (2019) yang mencatat bahwa terjadi disparitas yang cukup tinggi antara jumlah barang yang bongkar dengan jumlah barang yang dimuat melalui pelabuhan di Morotai. Ketidakpastian jumlah barang yang dimuat menyebabkan waktu kedatangan kapal menjadi tidak pasti, muatan kapal seringkali kosong sehingga biaya angkutan untuk barang yang didatangkan dari luar menjadi lebih mahal. Disisi lain, in-efisiensi logistic juga berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Morotai. Cairullah Amin (2021) menyimpulkan bahwa Biaya logistik maritim yang tinggi sangat tidak efisien karena dapat menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi khususnya peningkatan investasi di daerah. Pengelolaan pelabuhan yang tidak efisien dapat meningkatkan tambahan biaya yang tinggi sehingga beban biaya logistik maritim meningkat. Biaya logistik yang mahal dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pulau ketika ingin melakukan kerjasama perdagangan dengan wilayah lain.

Infrastruktur dasar

Sampai dengan tahun 2021 infrastruktur yang berhasil dibangun yakni jalan utama sepanjang 3 Km, energi listrik 106 kVa, Kantor Administrator, Jaringan Telekomunikasi, dan *Water Storage* 9,25 liter per detik. Namun demikian, hasil wawancara dengan responden kunci dan sumber pemberitaan media menyebut bahwa penyediaan infrastruktur tersebut belum cukup terutama jika dikaitkan langsung dengan industrialisasi sektor perikanan. Beberapa infrastruktur yang belum memadai antara lain (1) pelabuhan ekspor, dan bandara yang mampu menjamin efisiensi logistic dan

konektivitas menuju Morotai (hanya ada 1 kali penerbangan sehari dan harganya relatif tinggi); (2) air bersih PDAM belum sampai di lokasi KEK; (3) Jaringan listrik dan sinyal telekomunikasi di Pulau Morotai juga masih terbatas.

Kondisi inilah yang menyebabkan investasi belum masuk secara optimal terutama di sektor perikanan. Keberadaan fasilitas infrastruktur sangat mempengaruhi proses bisnis di lingkungan KEK Morotai. Keseimbangan atau interaksi antar infrastruktur tersebut akan menjadikan harmonisasi kegiatan atau program-program di KEK Morotai dapat berjalan dengan baik.

Pelabuhan perikanan serta fasilitas pendukungnya

Pelabuhan perikanan belum tersedia dengan memadai terutama dalam menunjang ekspor produk perikanan. Keberadaan pelabuhan saat ini belum terkelola dengan baik sehingga masih terjadi inefisiensi logistik. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan juga menyebabkan nelayan tuna Morotai banyak yang mendaratkan ikan di pelabuhan Ternate dan pelabuhan Bacan.

Efektifitas kawasan industri perikanan terpadu

Hasil telaahan dokumen menyimpulkan bahwa keberadaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai yang dibangun sejak tahun 2015 belum menunjukkan kinerja optimal. Menurut Achmad Zamroni (2019), ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan SKPT di Morotai, yaitu: tata niaga yang belum teridentifikasi, investasi, *destructive fishing* dan IUU, konflik akses pemanfaatan SDKP antar nelayan, rendahnya pengetahuan, belum ada penetapan kawasan konservasi perairan (KKP), belum optimalnya pengembangan pariwisata bahari, mata pencaharian utama masyarakat lokal lebih berorientasi pertanian, usaha perikanan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan (konsumsi), usaha perikanan didominasi nelayan andon (Bitung), terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait diversifikasi hasil pengolahan ikan, masih lemahnya sumberdaya nelayan dalam pengelolaan kapal diatas 5 GT.

Akses nelayan terhadap sarpras perikanan tangkap

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti kapal penangkap ikan, terutama sejak ditetapkan sebagai kawasan SKPT pada tahun 2015 lalu. Data tahun 2022 tercatat sebanyak 1.196 unit kapal ikan masing-masing untuk ukuran 1 – 3 GT sebanyak 479 unit; ukuran 5 GT sebanyak 16 unit; ukuran > 30 GT sebanyak 1 unit, sementara untuk ukuran < 1 GT sebanyak 665 unit atau 53% dari total armada kapal dan sarana lainnya berupa rumpon (Morotai Satu Data, 2022). Hasil analisis dengan melihat komposisi ukuran kapal ikan dan produktivitas hasil tangkapan ikan tuna dan cakalang menunjukkan bahwa sebenarnya akses masyarakat terhadap sarpras perikanan tangkap belum optimal. Ini ditunjukkan juga dari hasil wawancara bahwa masih banyak nelayan andon (nelayan dari luar) yang melakukan penangkapan tuna di wilayah perairan Morotai, sementara akses nelayan local masih minim untuk menjangkau jarak tangkap. Disamping itu permasalahan utama lainnya yakni akses masyarakat terhadap ketercukupan BBM dan Es juga masih belum optimal.

Rasio jumlah kapal dengan kebutuhan industri.

Hasil telaahan dokumen terhadap eksisting SKPT Morotai, bahwa salah satu masalah kurang optimalnya industri perikanan di Morotai karena tingkat utilitas yang rendah, hal ini disebabkan oleh jumlah kapal tangkap ikan tuna dan cakalang yang masih sedikit, sehingga produktivitas hasil tangkapan yang masih rendah. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlanjutan KEK Morotai (zona industri perikanan), jika kapasitas industri tidak diimbangi dengan jumlah armada kapal ikan yang memadai.

5.3. Faktor-faktor sensitif pada aspek SDI dan Lingkungan

Penerapan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM).

Analisis indeks dekomposit EAFM, domain teknik penangkapan ikan di Kabupaten Pulau Morotai memiliki nilai komposit yang paling tinggi dan mendeskripsikan status baik dalam menerapkan prinsip-prinsip EAFM. Dengan analisis

pendekatan EAFM, nilai komposit rata-rata seluruh domain berkisar antara 60-80 yang mencerminkan status dan kinerja sumber daya perikanan tuna yellowfin di Kabupaten Pulau Morotai yang baik dalam tingkat keberlanjutannya dengan menerapkan prinsip-prinsip EAFM. Namun, sejumlah indikator masih dominan di setiap domain yang memiliki skor rendah sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan manajemen, terutama untuk aspek sosial dan ekonomi. Abdullah dan Imran (2020) menyimpulkan bahwa pengelolaan perikanan tuna di Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan pendekatan ekosistem, teridentifikasi bahwa indikator "*range collapse*" atau pengurangan hasil tangkapan akibat berkurangnya daerah penangkapan ikan tuna merupakan indikator yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan ke depan. Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) disatu sisi menjadi upaya mitigasi untuk melakukan pengendalian penangkapan ikan, namun yang perlu menjadi perhatian yakni terkait kesiapan infrastruktur, penyediaan data base stok yang valid (berbasis *evidence-based*), dan meminimalisir konflik antara nelayan tradisional dengan korporasi.

Status stok sumber daya ikan

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa potensi ikan di tiga WPP yang berada di Pulau Morotai sebanyak 1.714.158 ton/tahun yang terdiri dari WPP 715 sebanyak 631.704 ton/tahun, WPP 716 sebanyak 478.766 ton/tahun dan WPP 717 sebanyak 603.688 ton/tahun. Dari potensi ketiga WPP tersebut diperkirakan sekitar 5% dari Potensi yang ada akan didaratkan di Pulau Morotai (SKPT Morotai) yaitu sebanyak 85.707,9 ton/tahun dengan MSY 68.566 ton/tahun. Produksi Ikan Eksisting di Pulau Morotai sebesar 6.272 ton/tahun (baru dimanfaatkan sekitar 9.15% dari potensi MSY). Masih ada potensi sebanyak 62.294 ton/tahun yang belum dimanfaatkan. Jika dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa status eksploitasi SDI masih dalam kategori "*developing*".

Trend IUU and destructive fishing

Meski trend kejadian *IUU* dan *destructive fishing* menunjukkan kecenderungan menurun dalam 4 (empat) tahun terakhir, namun kejadian tersebut masih terjadi. Menurut hasil analisis, ada 2 (dua) faktor yang berpotensi meningkatkan kecenderungan *IUU* dan *destructive fishing* yaitu: (1) lemahnya pengawasan dan penindakan hukum; (2) kondisi ekonomi nelayan, utamanya nelayan tradisional; dan (3) pengetahuan yang minim. Informasi yang didapat dari petugas pengawas di Satuan Pengawasan Morotai menyebut bahwa kejadian *IUU fishing*, dan *destructive fishing* masih terjadi. Menurutnya masih terdapat banyak pelanggaran diantaranya kejadian penangkapan ikan di luar WPP, misalnya banyak nelayan asal Bitung yang melakukan penangkapan ikan di perairan Morotai dan berpotensi terjadinya konflik antar nelayan.

Status ekosistem penyangga.

Hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa Pulau Morotai telah memiliki kawasan ekosistem penyangga yakni Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pulau Morotai (KKPD Kabupaten Pulau Morotai). Dalam pembagian administratif Indonesia, KKPD Kabupaten Pulau Morotai berada di wilayah administratif Kabupaten Pulau Morotai. Dasar hukum penetapannya adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 523/42/PM/2012. Luas kawasan KKPD Kabupaten Pulau Morotai adalah 330 Hektare. KKPD Kabupaten Pulau Morotai termasuk kawasan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam.

5.4 Faktor-faktor sensitif pada aspek ekonomi

Kinerja struktur ekonomi nelayan

Hasil telaah dokumen terhadap kinerja struktur ekonomi nelayan yang meliputi indikator: (1) daya beli/nilai tukar nelayan; dan (2) pendapatan perkapita, menunjukkan bahwa keberadaan KEK Morotai belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal terhadap kinerja ekonomi masyarakat nelayan. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar nelayan (NTN) Morotai tahun 2023 sebesar 101,91. Meski nilai NTN > 100, namun angka ini masih sangat riskan terhadap guncangan ekonomi. Sementara pendapatan perkapita masyarakat Morotai atas dasar harga konstan sebesar

14.241.000 per kapita per tahun (BPS Maluku Utara, 2022). Angka ini berada cukup jauh dari angka rata-rata Provinsi Maluku Utara, dan Morotai menempati urutan ke-sembilan dari sepuluh Kabupaten yang ada.

Kinerja investasi

Hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa kinerja investasi pada KEK Morotai masih jauh dari realisasi. Khusus investasi dalam pembangunan zona industri pengolahan perikanan belum ada yang masuk. Laporan Dewan Nasional KEK tahun 2022 mencatat bahwa realisasi investasi yang masih minim yakni baru sebesar Rp.449,95 miliar dari target komitmen investasi di tahun 2025 senilai Rp. 30,44 triliun atau capaian realisasi baru mencapai 1,50%.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Morotai

Hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB Morotai meski ada kenaikan pertumbuhan, namun share-nya masih minim, jika dibandingkan dengan potensi nilai sumber daya ekonomi yang ada. Kondisi ini menyimpulkan bahwa KEK Morotai belum memberikan efek signifikan terhadap PDRB Morotai terutama untuk sektor perikanan. Hal ini juga diperkuat dengan laporan PT. Jababeka KEK Morotai, bahwa khusus untuk sektor perikanan belum digarap secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian Iskandar (2022), menyimpulkan bahwa hadirnya KEK Morotai sejauh ini masih belum memberikan dampak yang positif, bahkan karena besarnya asumsi biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat dinilai bahwa pembangunan KEK saat ini justru berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 9%. Hal tersebut diperkuat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Morotai tahun 2022 yang mencatat Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2018 memiliki kontribusi 47,15 persen. Hal ini kemudian mengalami penurunan dalam 5 (tahun) terakhir, yakni tahun 2022 kontribusi sektor ini menurun menjadi 45,76% dengan pertumbuhan rata-rata 2,81%.

Kinerja produksi perikanan tangkap

Kinerja perikanan tangkap dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) naik rata-rata 68,71% per tahun. Tahun 2021 tercatat produksi perikanan tangkap mencapai 42.843 ton. Jika dibandingkan dengan potensi lestari yang ada di perairan morotai (WPP 715, 716, dan 717) sebesar 1.457.000 ton per tahun (85% dari total potensi lestari). Dari angka tersebut berarti pemanfaatan masih sangat minim yakni hanya sebesar 2,94%.

Kinerja ekspor produk perikanan

Data Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan semester 2 tahun 2023 mencatat total ekspor ikan tuna asal Morotai sebanyak 159,68 ton, jika dibanding dengan potensi yang ada angka ini sangat minim. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) mengakui, kondisi infrastruktur pelabuhan belum representatif untuk digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan ekspor ikan jenis tuna secara langsung ke luar negeri. Disisi lain, meski Morotai masuk dalam kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), namun kondisi aktivitas pelayaran belum seramai daerah lain, sehingga untuk mengeksport komoditas ikan tuna ke luar negeri harus dikirim ke Surabaya.

5.5. Faktor-faktor sensitif pada aspek sosial-budaya

Potensi konflik sosial atas penetapan KEK Morotai

Hasil wawancara dengan responden kunci menunjukkan bahwa di perairan Morotai masih terjadi konflik horizontal terutama diantara nelayan. Konflik dipicu oleh adanya nelayan andon (nelayan pendatang) dari luar WPP, dan masih terjadinya *IUU Fishing* yang masih terjadi. Disamping itu, keberadaan rumpon ilegal menjadi ancaman bagi nelayan penangkap tuna di perairan Morotai.

Tingkat kemiskinan

Hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 3.770 orang atau sekitar 5,42%. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 4.450 orang atau 6,52%. Kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan yang meningkat tipis dari 0.72 pada 2021 menjadi 0.74 pada 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan yang tetap sebesar 0.13 dari tahun lalu mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin tidak mengalami perubahan. Semakin besar indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar.

Jumlah tenaga kerja formal dalam KEK terhadap total tenaga kerja

Hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2022 di Kabupaten Pulau Morotai menurut Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022 sebesar 32.762 jiwa, dimana 31.336 jiwa sebagai pekerja dan 1.426 sebagai pengangguran terbuka. Jika dibandingkan jumlah serapan tenaga kerja formal dalam KEK menunjukkan bahwa jumlah serapannya sangat minim. Hingga tahun 2022 share serapan tenaga kerja KEK Morotai terhadap total tenaga kerja hanya sebesar 0,43%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Morotai masih rendah yakni sebesar 63,80. Ini menunjukkan bahwa KEK Morotai belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kualitas sumber daya manusia.

Penghargaan terhadap local wisdom

Hasil wawancara dengan nelayan bahwa masyarakat Morotai memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan namanya "hao gumi". Selain tidak merusak lingkungan, mereka juga meyakini adanya kekuatan supranatural. Namanya "hao gumi". Kegiatan menangkap ikan seperti ini sudah dilakoni para leluhur masyarakat Morotai hingga turun-temurun. Hao gumi berasal dari bahasa Galela, suku terbesar yang mendiami Pulau Morotai. Hao artinya 'menangkap ikan' dan Gumi artinya 'tali'. Kearifan lokal menjadi sangat penting dan mestinya dijadikan acuan dalam pembuatan hukum positif dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Konsep "hao gum" yang dilakukan masyarakat telah sejalan dengan konsep pembangunan *blue economy*.

Prefalensi stunting

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Morotai sangat rendah yakni sebesar 22,71 kg per kapita per tahun dan jauh di bawah rata-rata nasional. Rendahnya tingkat konsumsi ini menyebabkan masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Morotai di tahun 2022 sangat tinggi yakni tercatat sebesar 28,3% dan jauh di atas rata-rata nasional (20%) (SSGI, 2022).

Jumlah nelayan local

Jumlah nelayan Morotai cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir (2020-2022). Tahun 2022 tercatat jumlah nelayan local sebanyak 3.734, dimana secara umum masih didominasi nelayan tradisional dengan akses sarana dan prasarana yang minim. Belum optimalnya kapasitas dan jumlah nelayan akan mempengaruhi produktivitas hasil tangkapan dan ini secara langsung akan mempengaruhi keberlanjutan industri pengolahan perikanan yang ada.

Pengangguran terbuka.

Jumlah pengangguran terbuka masih tergolong cukup tinggi. Tahun 2022 jumlah pengangguran terbuka mencapai 1.426 orang atau sekitar 4,35% dari total jumlah angkatan kerja. Kondisi ini menyimpulkan bahwa pasca penetapan KEK Morotai belum memberikan dampak besar terhadap serapan tenaga kerja.

6. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa KEK Morotai memiliki indeks keberlanjutan sebesar 49,28, yang termasuk kategori kurang berkelanjutan. Beberapa faktor sensitif, sebanyak 32 elemen, ditemukan berpengaruh signifikan terhadap status keberlanjutan ini. Selain itu, analisis pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders) menunjukkan adanya empat kelompok utama. Kelompok pertama adalah pemangku kepentingan dengan tingkat pengaruh dan kepentingan tinggi yang harus dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi. Kelompok kedua terdiri dari pihak dengan pengaruh tinggi namun kepentingan rendah, yang perlu terus dibina agar dapat berperan aktif. Kelompok ketiga adalah pihak dengan pengaruh rendah namun kepentingan tinggi, yang perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan KEK. Terakhir, kelompok dengan pengaruh dan kepentingan rendah tetap harus dijaga komunikasinya.

Untuk meningkatkan kinerja KEK Morotai, diperlukan intervensi pada faktor-faktor sensitif melalui perbaikan tata kelola dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Langkah-langkah konkret meliputi percepatan pengembangan industri perikanan terpadu dengan target memanfaatkan minimal 50% hasil tangkapan tuna untuk ekspor. Revitalisasi Bandara Pitu menjadi bandara kargo dan pengembangan pelabuhan perikanan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) juga menjadi prioritas.

Optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), modernisasi armada kapal tuna, serta dukungan infrastruktur seperti BBM, listrik, dan sumber air tawar sangat penting. Selain itu, insentif fiskal dan nonfiskal harus dirancang lebih efektif untuk menarik investasi. Harmonisasi regulasi antar sektor, perbaikan tata kelola WPP, dan penerapan *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* juga krusial. Upaya pemberdayaan nelayan, penguatan pengawasan IUU Fishing, serta konektivitas tata ruang melalui integrasi RTRW dan RZWP3K harus segera dilakukan untuk memastikan KEK Morotai dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Referensi

- Adullah R.M., Imran Teran., Nebuchadnezzar Akbar. (2020). Evaluasi Pengelolaan Perikanan Tuna Berdasarkan Pendekatan Ekosistem Di Kabupaten Pulau Morotai - Jurnal Enggano Vol. 5, No. 2 : 143-151.
- Abdullah R.M., Kamaruddin., Sulfiarini., Edi Kurniawan. (2022). Evaluasi Pengelolaan Perikanan Madidihang (Thunus albacares) berbasis Ekosistem di Perairan Kota Ternate (Studi Kasus berbasis di PPN Ternate), Jurnal Agibisnis Perikanan Vol. 15 No. 1, 28-34.
- Achmad Fauzi. Pernyataan dalam Harian Kompas Edisi 27 September 2021, diakses 15 November 2022 melalui www.kompas.id
- Andi Sagita dan Cocon. (2021) Antologi Pemikiran: Transformasi Kelautan dan Perikanan Dalam Pencapaian SDGs, Penerbit: Kencana Ratu Pualam Press, Jakarta.
- Abdul Kadir Karding. (2022). Pengantar Makalah Kunci: Diskusi Publik Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan, Jakarta.
- BPS Morotai. (2022). Statistik Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Diterbitkan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morotai.
- BPS Morotai. (2021). Statistik Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Diterbitkan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morotai.
- BPS Maluku Utara. (2021). Statistik Perekonomian Kabupaten Morotai. Ternate.
- Brussevich, M. (2020). The Socio-economic impact of special economic zones: Evidence from Cambodia. IMF Working Papers, Cambodia: Council for the Development of Cambodia.
- Cocon. (2022). Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Akuakultur, Penerbit: CV. Pena Persada, Purwokerto.
- Chairullah Amin dan Fahima Naser. (2021). Artikel: Logistik Maritim Tidak Efisien, Universitas Khaerun, Ternate.
- Dewan Nasional KEK. (2021). Laporan Akhir Perkembangan KEK, Jakarta
- Dewan Nasional KEK. (2022). Laporan Akhir Perkembangan KEK, Jakarta
- Data Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao Kab Pulau Morotai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses dari kkji.kp3k.kkp.go.id tanggal 15 November 2023.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morotai. (2022). Statistik Perikanan Tangkap. Morotai
- Fauzi, A dan S. Anna. (2002). Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan. Jurnal Pesisir dan Lautan, Jakarta.

- Gunter Pauli. (2010). 10 Years, 100 Innovation, 100 milion jobs, Publisher: Paradigm Publication, USA.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi. Jakarta
- Iskandar dan Sulistyaningrum. (2023). Evaluasi Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai, Repository Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jababeka KEK Morotai. (2022). Laporan Perkembangan KEK Morotai. Jakarta
- Kompas, Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Perlu Lebih Spesifik, www.kompas.id, edisi 27 September 2021
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). Laporan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai. Jakarta
- Morotai Satu Data. (2022). Eksisting Sarpras Perikanan Tangkap, Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai.
- Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (Bappenas) & OECD. (2021). Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation. Jakarta
- OECD. (2016). The Ocean Economy in 2030. <https://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-en>
- RS, P. H., & Silvia, E. (2017). Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomikawan*, 15(1), 77797.
- Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2020). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur, *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 40-54
- Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). (2022). Prevalensi Stunting Kabupaten Morotai
- UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2009.
- Wood, AK. (2017). Special Economic Zones "Performance, Problems and Opportunities" A survey based empirical study on SEZs in India, PHD Research Bureau, PHD Chamber Of Commerce and Industry.
- WWF Indonesia. (2021). Principles for Sustainable Blue Economy. Jakarta.